

Katalog: 3205025.76



PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



STATISTIK KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI BARAT

2021



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT



**STATISTIK KEMISKINAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

2021

STATISTIK KEMISKINAN PROVINSI SULAWESI BARAT 2021

ISSN: 2655-0326

No. Publikasi: 76000.2230

Katalog BPS: 3205025.76

Ukuran Buku: 18 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xii + 55 Halaman

Naskah:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak Oleh:

Erlangga Grafis

Boleh dikutip dengan mencantumkan sumbernya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Tina Wahyufitri, S.Si.,M.Sc.

Penanggung Jawab:

Heni Djumadi, S.ST.

Editor:

Sri Mulyani, S.ST.,M.M.

Penulis:

Rina Rachmawati, S.ST.

Desain Layout:

Rina Rachmawati, S.ST.

<https://sulbar.bps.go.id>

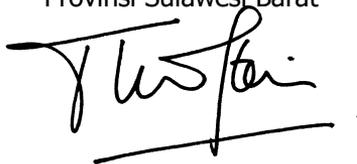
KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat 2021 merupakan publikasi yang memberikan gambaran kemiskinan secara umum dan karakteristiknya. Publikasi ini secara rutin diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.

Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah perkembangan tingkat kemiskinan provinsi, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten, dan perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi. Selain itu, disajikan pula ketimpangan pengeluaran penduduk dan profil rumah tangga miskin di Sulawesi Barat.

Penerbitan publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen data khususnya pemangku kepentingan. Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi ini di masa mendatang.

Mamuju, Agustus 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



TINA WAHYUFITRI, S.Si.,M.Si.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	2
1.3. Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
1.5. Konsep dan Definisi	3
1.6. Metode Penghitungan Kemiskinan	5
1.7. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan	9
BAB II PERSPEKTIF KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2021	11
2.1. Garis Kemiskinan	11
2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	13
2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan	15
2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan	17
BAB III PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2021	19
3.1. Garis Kemiskinan Kabupaten	19
3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten	20
3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	22
3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten	24
BAB IV PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI DI PULAU SULAWESI TAHUN 2017-2021	27
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi	27
4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Pulau Sulawesi	28
4.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi	30
4.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi	31

	Hal
BAB V KETIMPANGAN PENGELUARAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021	33
5.1. <i>Gini Ratio</i>	33
5.2. Kriteria Bank Dunia	35
BAB VI PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021	39
6.1. Karakteristik Sosial Demografi	39
6.2. Karakteristik Pendidikan	41
6.3. Karakteristik Ketenagakerjaan	43
6.4. Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal)	46
6.4.1. Luas Lantai	46
6.4.2. Jenis Lantai	47
6.4.3. Jenis Atap	48
6.4.4. Jenis Dinding	50
6.4.5. Sumber Penerangan	51
6.4.6. Sumber Air Minum	52
6.4.7. Fasilitas Jamban	53
6.4.8. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal	54

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Komponennya di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	13
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	15
3	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	19
4	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021.....	20
5	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021.....	21
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	23
7	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	25
8	Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2017-2021	27
9	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2017-2021	28
10	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2017-2021	29
11	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2017-2021	31
12	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi, 2017-2021	32
13	Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Barat Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2017-2021.....	37
14	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	40
15	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	41
16	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	42

No. Tabel	Judul Tabel	Hal
17	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	43
18	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	44
19	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kegiatan Formal/Informal Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	45
20	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m ²) di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	47
21	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	48
22	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	49
23	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	50
24	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	51
25	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, 2021.....	52
26	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban di Provinsi Sulawesi Barat, 2021....	53
27	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat, 2021	55

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Grafik	Hal
1	Garis Kemiskinan Menurut Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021.....	12
2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	14
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	16
4	Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021	18
5	<i>Gini Ratio</i> di Provinsi Sulawesi Barat Menurut Daerah, 2020-2021	33
6	<i>Gini Ratio</i> di Provinsi Sulawesi Barat Menurut Daerah, 2017-2021	34
7	Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Sulawesi Barat Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2020 – 2021.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan topik yang menarik untuk diperbincangkan bagi semua kalangan, baik politisi, budayawan, LSM, maupun praktisi bidang keilmuan lainnya. Persoalan kemiskinan juga merupakan problem yang mendasar bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Upaya penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan diantaranya adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya akan menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan untuk memberikan fokus perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat dipergunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2100 kilo kalori/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data dan jumlah persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal itu bisa terwujud karena BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup analisis perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Barat pada kondisi 2017-2021, perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021, perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2017-2021, ketimpangan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, dan profil rumah tangga miskin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyajian publikasi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

1. Bab I. Pendahuluan berisi latar belakang, ruang lingkup, sumber data, sistematika penulisan, konsep dan definisi serta metode penghitungan kemiskinan.
2. Bab II. Perspektif kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
3. Bab III. Perbandingan tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
4. Bab IV. Perbandingan tingkat kemiskinan antar provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2017-2021 meliputi garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan.
5. Bab V. Ketimpangan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.
6. Bab VI. Profil Rumah Tangga Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021.

1.5 Konsep Dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Konsep Kemiskinan BPS
 - Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*)

- “Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran)”
2. Penduduk miskin (*Headcount Index*- P_0) adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
 3. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
 4. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
 5. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan
 6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
 7. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

1.6 Metode Penghitungan Kemiskinan

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut :

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j

- Qjk = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j
 Vjk = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j
 J = Daerah (perkotaan atau perdesaan)
 p = Provinsi ke-p

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

Dimana :

- Kj_{kp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p
 \overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

Dimana :

- GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.
 J = Daerah (perkotaan atau perdesaan)
 p = Provinsi ke-p

Teknik penghitungan GKNM

- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14

komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan.

- Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

Dimana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004) dan daerah j (kota/desa)

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan)

p = Provinsi ke-p

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$${}_{\%}PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

Dimana:

${}_{\%}PM_p$ = % penduduk miskin di provinsi p

PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p

P_p = Jumlah penduduk di provinsi p

Untuk menghitung ukuran indikator kemiskinan, digunakan formula *Foster Greerthorbecke* sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

α = 0 (*Head Count Index* - P_0)

α = 1 (*Poverty Gap Index* - P_1)

α = 2 (*Severity Index* - P_2)

n = Jumlah penduduk

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin

q = Banyaknya penduduk di bawah garis kemiskinan

1.7 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai pendekatan pendapatan yang bersumber dari data Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan dua ukuran untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

- Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

Dimana :

G = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

X_k = Proporsi kumulatif dari penduduk untuk $k = 0, 1, 2... n$
dengan $X_0 = 0$ dan $X_n = 1$

Y_k = Proporsi kumulatif dari pengeluaran untuk $k = 0, 1, 2... n$
dengan $Y_0 = 0$ dan $Y_n = 1$

- Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.

- Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:
 1. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
 2. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
 3. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
 4. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari penduduk kaya ke penduduk miskin akan menurunkan ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi kriteria ini.
- Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:
 1. Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari subkelompok masyarakat (sub-grup).
 2. Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan Teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

BAB II

PERSPEKTIF KEMISKINAN

DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 – 2021

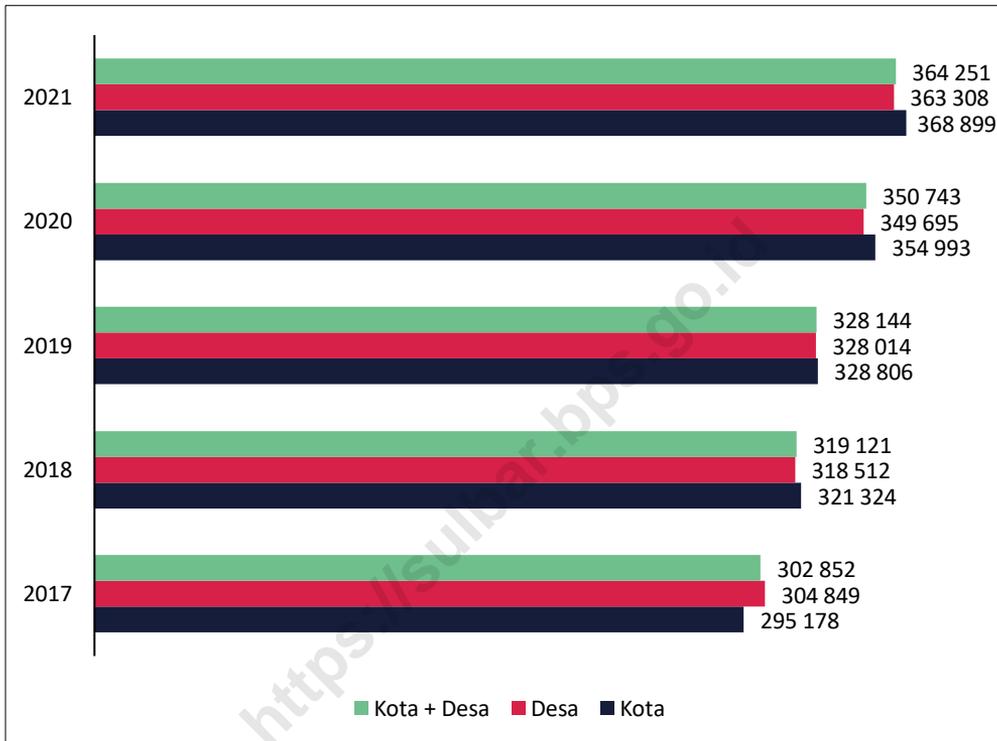
Dinamika kemiskinan dari waktu ke waktu dapat dilihat dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan tren tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2017-2021. Paparan kemiskinan ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, serta tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2.1. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017-2021 menunjukkan pola yang sama, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Garis kemiskinan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Rp. 302.852,- per kapita per bulan pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 364.251,- per kapita per bulan pada tahun 2021. Dari Gambar 1 terlihat bahwa pada tahun 2017 garis kemiskinan perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan, namun sejak tahun 2018 polanya berubah, garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan garis kemiskinan di perdesaan.

Garis kemiskinan pada tahun 2021 sebesar Rp. 364.251,- per kapita per bulan, meningkat Rp. 13.508,- per kapita per bulan dibandingkan garis kemiskinan pada tahun 2020. Peningkatan garis kemiskinan pada daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan pada daerah perdesaan. Garis kemiskinan di daerah perkotaan meningkat sebesar Rp. 13.906,- per kapita per bulan dimana garis kemiskinan daerah perkotaan pada tahun 2021 sebesar Rp. 368.899,- per kapita per bulan. Garis kemiskinan daerah perdesaan pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 13.613,- per kapita per bulan jika dibandingkan tahun 2020, dimana garis kemiskinan daerah perdesaan tahun 2021 sebesar Rp. 363.308,- per kapita per bulan. Dengan kondisi ini, penduduk yang memiliki pengeluaran Rp. 365.000 per kapita per bulan tidak dihitung sebagai penduduk miskin di daerah perdesaan, namun dihitung sebagai penduduk miskin di daerah perkotaan.

Gambar 1
Garis Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (Rp/Kapita/Bln), 2017-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Apabila dilihat dari komponen pembentuk Garis Kemiskinan (makanan dan non makanan), selama kurun waktu 2017-2021, Garis Kemiskinan Makanan memberikan kontribusi terbesar yaitu sekitar 76-79 persen, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan hanya memberikan kontribusi sekitar 20-23 persen.

Pada tahun 2017, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan paling tinggi sepanjang lima tahun terakhir. Namun, kontribusi garis kemiskinan makanan semakin lama semakin berkurang dan garis kemiskinan non makanan semakin menunjukkan perannya. Kontribusi garis kemiskinan makanan pada tahun 2021 sebesar 76,80 persen dan kontribusi garis kemiskinan non makanan sebesar 23,20 persen.

Tabel 1
Garis Kemiskinan Menurut Komponennya
di Provinsi Sulawesi Barat (Rp/Kapita/Bulan),
2017-2021

Tahun (1)	Makanan (GKM)		Non Makanan (GKNM)		Jumlah (GK) (6)
	Nilai (2)	% (3)	Nilai (4)	% (5)	
2017	239 359	79,03	63 493	20,97	302 852
2018	249 788	78,27	69 333	21,73	319 121
2019	254 518	77,56	73 626	22,44	328 144
2020	270 655	77,17	80 088	22,83	350 743
2021	279 747	76,80	84 504	23,20	364 251

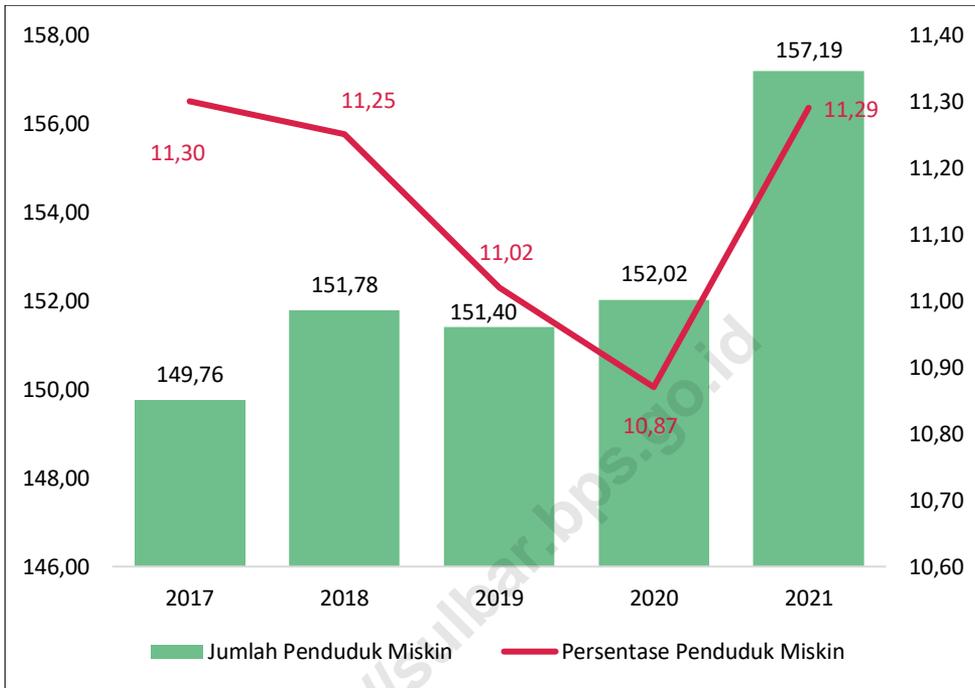
Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

2.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2017-2020 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 11,30 persen, turun menjadi sebesar 11,25 persen tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Sulawesi Barat turun menjadi 11,02 persen dan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin turun lagi menjadi 10,87 persen. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin naik menjadi 11,29 persen. Dalam kurun waktu 2020-2021, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen poin.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 149,76 ribu jiwa. Meskipun secara persentase berkurang, jumlah ini secara absolut bertambah menjadi 151,78 ribu jiwa pada tahun 2018. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Sulawesi Barat berkurang menjadi 151,40 ribu jiwa dan kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 152,02 ribu jiwa. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin kembali bertambah menjadi 157,19 ribu jiwa. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, jumlah penduduk miskin mengalami perubahan fluktuatif, dimana kenaikan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2021.

Gambar 2
Jumlah (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin
Di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Selama lima tahun terakhir, jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan cenderung fluktuatif. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 di daerah perkotaan sebesar 27,82 ribu jiwa (9,82 persen) dan di daerah perdesaan sebesar 129,37 ribu jiwa (11,67 persen). Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak bila dibandingkan daerah perkotaan atau mencapai 82,30 persen dari total penduduk miskin. Hal ini tidak terlepas dari jumlah lapangan pekerjaan yang lebih banyak tersedia di daerah perkotaan dibanding perdesaan. Diperlukan program-program yang tepat dalam rangka mengatasi kesenjangan di daerah perdesaan dan perkotaan.

Tabel 2
Jumlah (ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin	
	Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	23,50	126,26	8,53	12,03
2018	30,76	121,02	9,64	11,75
2019	31,28	120,12	9,63	11,45
2020	31,67	120,34	9,59	11,26
2021	27,82	129,37	9,82	11,67

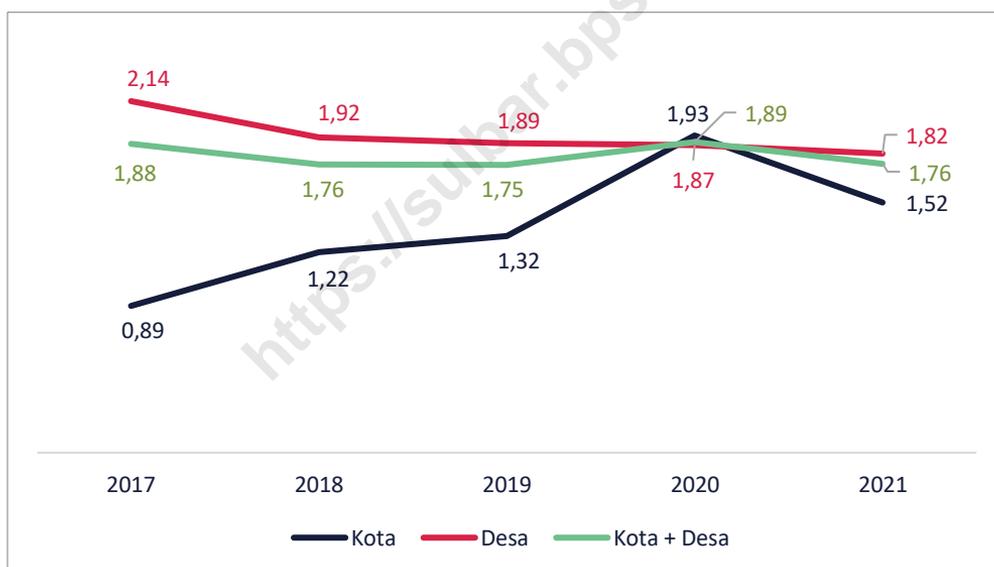
Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

2.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan

Tingkat kedalaman kemiskinan selama tahun 2017-2021 secara umum berfluktuasi setiap tahunnya dan mengalami kecenderungan menurun, kecuali pada tahun 2020. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 1,89, meningkat 0,14 poin jika dibandingkan tahun 2019. Titik tertinggi indeks kedalaman kemiskinan terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 1,89 dan titik terendah terjadi pada tahun 2019 dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,75. Dengan demikian, secara umum, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan selama periode 2017-2019, namun pada tahun 2020 kembali menjauhi garis kemiskinan. Kondisi sebagai dampak adanya pandemi Covid-19, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinan cukup tajam. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran penduduk miskin kembali mendekati garis kemiskinan. Dengan adanya berbagai macam program pengentasan kemiskinan, diharapkan penduduk miskin dapat segera keluar dari kemiskinan.

Tingkat kedalaman kemiskinan perdesaan dan perkotaan memiliki kecenderungan yang berbeda selama lima tahun terakhir. Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan cenderung mengalami penurunan sedangkan di daerah perkotaan cenderung meningkat sampai tahun 2020. Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan pada tahun 2021 sebesar 1,82, lebih rendah 0,05 poin jika dibandingkan tahun 2020. Selama lima tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan tertinggi sebesar 2,14 pada tahun 2017 dan berada pada titik terendah sebesar 1,82 pada tahun 2021. Semakin rendahnya indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan sebuah pertanda baik.

Gambar 3
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Daerah
Di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2021 sebesar 1,52, lebih rendah 0,41 poin jika dibandingkan tahun 2020. Selama lima tahun terakhir, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan tertinggi sebesar 1,93, terjadi pada tahun 2020, dan berada pada titik terendah sebesar 0,89, terjadi pada tahun 2017. Menurunnya indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan pada tahun 2021 merupakan pertanda baik karena rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di daerah perkotaan semakin mendekati garis kemiskinan.

Selama periode 2017-2021, tingkat kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan sebesar 1,93, lebih tinggi dibanding indeks kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan yang hanya sebesar 1,87. Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan di daerah pedesaan kembali lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan.

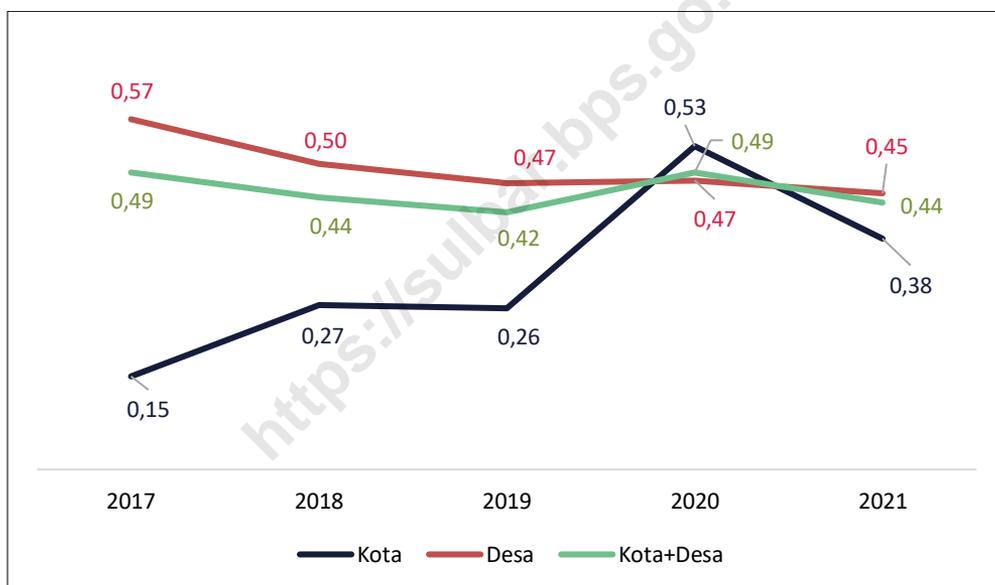
2.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan

Pada periode 2017-2021, tingkat keparahan kemiskinan secara umum di Sulawesi Barat cenderung fluktuatif, dimana nilai indeksnya berkisar antara 0,42-0,49. Titik tertinggi indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Barat terjadi pada tahun 2017 dan 2020, yaitu sebesar 0,49, sementara titik terendahnya tercapai pada tahun 2019 sebesar 0,42. Pada tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan Sulawesi Barat menurun jika dibandingkan dengan 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2021 semakin berkurang.

Indeks keparahan kemiskinan di daerah pedesaan selama lima tahun terakhir semakin menurun. Indeks keparahan kemiskinan di daerah pedesaan berada pada titik tertinggi di tahun 2017 dengan nilai sebesar 0,57 dan mencapai titik terendah pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 0,45. Tingkat keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, kecuali pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2017-2019 dan tahun 2021 lebih timpang dibandingkan dengan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan. Sebaliknya, pada tahun 2020, distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah Perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah pedesaan.

Selama tahun 2017-2021, indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan cenderung berfluktuasi. Indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan mencapai titik tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,53, dan berada pada titik terendah pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,15. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk miskin di daerah perkotaan selama lima tahun terakhir semakin bertambah ketimpangannya sampai tahun 2020, kemudian sedikit berkurang pada tahun 2021.

Gambar 4
Indeks Keparahkan Kemiskinan Menurut Daerah
di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

BAB III
PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR KABUPATEN
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2021

3.1. Garis Kemiskinan Kabupaten

Garis kemiskinan pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2017-2021. Peningkatan terbesar garis kemiskinan pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020 terjadi di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu sebesar Rp. 15.386,- per kapita perbulan. Peningkatan terendah pada periode yang sama terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah, yang meningkat sebesar Rp. 9.973,- per kapita perbulan.

Tabel 3
Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat (Rp/kapita/bulan), 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	335 248	349 522	360 362	384 344	399 350
Polewali Mandar	351 856	366 355	376 827	401 057	416 443
Mamasa	239 112	249 103	256 544	273 513	283 758
Mamuju	241 616	252 429	259 969	277 078	287 896
Pasangkayu	328 100	330 226	332 145	354 115	367 941
Mamuju Tengah	226 559	236 699	239 592	255 440	265 413

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Bila dibandingkan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, terlihat bahwa pada tahun 2017-2021, garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar merupakan garis kemiskinan tertinggi setiap tahun. Garis kemiskinan terendah di Provinsi Sulawesi Barat selama lima tahun terakhir berada di Kabupaten Mamuju Tengah, dimana garis kemiskinan di Mamuju Tengah masih di bawah Rp. 270.000,- per kapita per bulan

3.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten

Dari seluruh kabupaten, Kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten dengan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan Kabupaten Pasangkayu menjadi kabupaten dengan jumlah absolut penduduk miskin terendah di Sulawesi Barat. Selama periode 2017-2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah cenderung berfluktuasi. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Majene, Mamasa, dan Mamuju pada periode yang sama justru cenderung meningkat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar mencapai titik tertinggi sebanyak 69,68 ribu jiwa pada tahun 2018. Sementara itu, lima kabupaten lainnya mencapai titik tertinggi jumlah penduduk miskin pada tahun 2021. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 yang secara langsung berdampak pada aktifitas ekonomi sebagian besar penduduk.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat (ribu jiwa),
2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	23,48	23,53	23,76	24,12	25,01
Polewali Mandar	69,25	69,68	68,86	68,18	69,32
Mamasa	21,14	21,22	21,64	21,86	22,29
Mamuju	19,11	20,42	20,57	20,65	22,30
Pasangkayu	7,95	7,65	7,42	7,95	8,53
Mamuju Tengah	8,82	9,28	9,16	9,25	9,74

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Terdapat dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin di bawah 10 ribu jiwa selama lima tahun terakhir, yaitu Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Di empat kabupaten lainnya, penduduk miskin selalu berjumlah di atas sepuluh ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin terendah di Kabupaten Pasangkayu terjadi pada tahun 2019, sedangkan di Mamuju Tengah jumlah terendah penduduk miskin pada tahun 2017.

Tabel 5
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	13,94	13,79	13,72	13,73	14,34
Polewali Mandar	16,05	15,97	15,60	15,26	15,68
Mamasa	13,51	13,38	13,42	13,38	13,77
Mamuju	6,88	7,18	7,06	6,92	7,46
Pasangkayu	4,84	4,53	4,28	4,48	4,77
Mamuju Tengah	6,95	7,14	6,87	6,79	7,13

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Selama periode 2017-2021, persentase penduduk miskin di Majene, Polewali Mandar, dan Mamasa selalu berada pada kisaran dua digit angka, sedangkan di tiga kabupaten lainnya berkisar satu digit. Pada periode yang sama, titik terendah persentase penduduk miskin Kabupaten Majene terjadi pada tahun 2019, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Tengah pada tahun 2020, Mamuju pada tahun 2017, dan Pasangkayu pada tahun 2019. Pada tahun 2021, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kabupaten Polewali Mandar (15,68 persen), sedangkan kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Pasangkayu (4,77 persen).

Pada tahun 2021, seluruh kabupaten mengalami kenaikan persentase penduduk miskin. Kenaikan persentase penduduk miskin terbesar terjadi di Kabupaten Majene, yaitu sebesar 0,61 persen poin, sedangkan kabupaten dengan kenaikan persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Pasangkayu (0,29 persen poin). Kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 0,42 persen poin, Kabupaten Mamasa naik 0,39 persen poin, Kabupaten Mamuju naik 0,54 persen poin, dan Kabupaten Mamuju Tengah naik 0,34 persen poin. Selama periode 2017-2021, tahun 2021 merupakan tahun dimana terjadi kenaikan persentase penduduk miskin terbesar di semua kabupaten.

3.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten

Tingkat kedalaman kemiskinan semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan pergerakan yang fluktuatif selama tahun 2017-2021. Jika dibandingkan pada tahun 2017, indeks kedalaman kemiskinan tahun 2021 pada empat kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, dan Mamuju Tengah, mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di empat kabupaten tersebut semakin menjauhi garis kemiskinan jika dibandingkan tahun 2017. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah dan peningkatan terendah di Kabupaten Mamasa. Sementara itu, di Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan.

Pada periode 2019-2021, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar terjadi tren penurunan, sebaliknya untuk Kabupaten Mamuju terjadi peningkatan. Pada tahun 2021, hanya dua kabupaten yang menunjukkan penurunan indeks kedalaman kemiskinan, yaitu Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Hal ini menunjukkan bahwa jarak antara rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 6
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	2,28	2,61	1,99	2,21	2,03
Polewali Mandar	2,02	3,08	3,00	2,74	2,52
Mamasa	2,19	2,24	2,19	1,71	2,25
Mamuju	0,90	0,79	0,84	1,06	1,08
Pasangkayu	0,76	0,47	0,46	0,36	0,55
Mamuju Tengah	0,44	1,00	1,37	0,88	1,15

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, indeks kedalaman kemiskinan mencapai titik tertinggi pada tahun 2018. Kabupaten Mamuju Tengah mencapai titik tertinggi indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2019. Sementara itu, Kabupaten Mamasa dan Mamuju mencapai titik tertinggi indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021. Untuk perbandingan antar kabupaten, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pasangkayu paling rendah jika dibandingkan kabupaten lainnya di Sulawesi Barat. Sebaliknya, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar selama lima tahun terakhir merupakan yang tertinggi di Sulawesi Barat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu terhadap garis kemiskinan Pasangkayu lebih dekat dibandingkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar.

3.4. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten

Selama periode 2017-2021, tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan perubahan yang berfluktuatif. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, indeks keparahan kemiskinan tahun 2021 di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin mengecil jika dibandingkan tahun 2017 pada dua kabupaten tersebut. Besaran penurunan tingkat keparahan kemiskinan pada dua kabupaten tersebut adalah sama. Sementara itu, pengeluaran di antara penduduk miskin di masing-masing kabupaten pada empat kabupaten lainnya semakin timpang. Kenaikan tingkat keparahan kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah dan peningkatan terendah di Kabupaten Mamasa.

Pada tahun 2018, indeks keparahan kemiskinan pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa, mencapai titik tertinggi selama lima tahun terakhir. Sementara itu, pada tahun yang sama indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mamuju justru mencapai titik terendah selama periode 2017-2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, hanya Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami penurunan tingkat keparahan kemiskinan pada tahun 2021. Di saat yang sama, tingkat keparahan kemiskinan di empat kabupaten lainnya naik. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah semakin timpang. Kenaikan tingkat keparahan kemiskinan terbesar adalah di Kabupaten Mamasa, sedangkan kenaikan terendah di Kabupaten Mamuju.

Tabel 7
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten
Di Provinsi Sulawesi Barat, 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	0,56	0,67	0,48	0,53	0,48
Polewali Mandar	0,41	0,89	0,84	0,79	0,59
Mamasa	0,51	0,60	0,50	0,31	0,59
Mamuju	0,16	0,15	0,16	0,24	0,29
Pasangkayu	0,19	0,10	0,09	0,04	0,11
Mamuju Tengah	0,04	0,24	0,34	0,18	0,27

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2021 sebesar 0,11, merupakan angka terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat. Kecilnya angka indeks keparahan kemiskinan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri di Kabupaten Pasangkayu relatif kecil bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Barat. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa tahun 2021 merupakan angka tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulawesi Barat. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah menyusul menempati peringkat tertinggi kedua dan ketiga. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, ukuran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri perlu menjadi pertimbangan disamping persentase penduduk miskin. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, maka upaya pengentasan kemiskinan semakin sulit untuk dilakukan. Dengan mengurangi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, diharapkan mereka dapat diangkat agar dapat segera keluar dari garis kemiskinan.

BAB IV
PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN ANTAR PROVINSI
DI PULAU SULAWESI TAHUN 2017-2021

4.1 Garis Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi

Selama periode tahun 2017-2021, garis kemiskinan provinsi di Pulau Sulawesi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan antar provinsi, peningkatan garis kemiskinan terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo yang meningkat sebesar 26,69 persen selama lima tahun terakhir. Peningkatan garis kemiskinan terendah terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat yang meningkat sebesar 15,30 persen. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan secara nasional, hanya garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah yang nilainya di atas angka nasional. Garis kemiskinan lima provinsi lainnya berada di bawah garis kemiskinan nasional.

Tabel 8
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi
(Rp/kapita/bulan), 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	333 510	344 418	371 283	391 197	410 805
Sulawesi Tengah	391 763	413 785	441 036	474 627	496 872
Sulawesi Selatan	283 461	306 545	329 880	350 264	372 491
Sulawesi Tenggara	285 609	303 618	327 402	356 444	378 589
Gorontalo	296 730	316 296	333 070	368 990	389 827
Sulawesi Barat	302 852	319 121	328 144	350 743	364 251
Indonesia	374 478	401 220	425 250	454 652	472 525

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

4.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi di Pulau Sulawesi

Selama tahun 2017-2021 tampak secara umum jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi cenderung berkurang, dimana pada tahun 2017 sebesar 2.113,16 ribu jiwa, hingga pada tahun 2020 sebanyak 2.006,79 ribu jiwa, dan naik pada tahun 2021 menjadi 2.047,95 ribu jiwa. Seluruh provinsi mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sampai tahun 2020, dan kembali naik pada tahun 2021.

Tabel 9
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi (ribu jiwa), 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	198,88	193,31	191,70	192,37	196,35
Sulawesi Tengah	417,87	420,21	410,36	398,73	404,44
Sulawesi Selatan	813,07	792,63	767,80	776,83	784,98
Sulawesi Tenggara	331,71	307,10	302,58	301,82	318,70
Gorontalo	205,37	198,51	186,03	185,02	186,29
Sulawesi Barat	149,76	151,78	151,40	152,02	157,19
Sulawesi	2 116,66	2 063,54	2 009,85	2 006,79	2 047,95
Indonesia	27 771,22	25 949,80	25 144,72	26 424,02	27 542,77

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Jika dibandingkan tahun 2020, jumlah penduduk miskin di pulau Sulawesi pada tahun 2021 bertambah. Kenaikan jumlah penduduk miskin disumbang oleh seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Kenaikan jumlah penduduk miskin terbesar disumbang oleh Provinsi Sulawesi Tenggara yang jumlah penduduk miskinnya naik sebesar 16,88 ribu jiwa. Sementara itu, kenaikan terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebanyak 1,27 ribu jiwa. Provinsi Sulawesi Barat menyumbang kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 5,17 ribu jiwa.

Jika kondisi tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, persentase penduduk miskin di setiap provinsi di Pulau Sulawesi cenderung turun. Seluruh provinsi di Pulau Sulawesi mengalami penurunan persentase penduduk miskin. Penurunan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di Gorontalo, yaitu turun 2,04 persen poin. Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin terendah terjadi di Sulawesi Barat yaitu 0,01 persen poin. Secara nasional, penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,5 persen poin. Selama lima tahun terakhir, hanya Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki persentase penduduk miskin di bawah angka kemiskinan nasional.

Tabel 10
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi, 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	8,10	7,80	7,66	7,62	7,77
Sulawesi Tengah	14,14	14,01	13,48	12,92	13,00
Sulawesi Selatan	9,38	9,06	8,69	8,72	8,78
Sulawesi Tenggara	12,81	11,63	11,24	11,00	11,66
Gorontalo	17,65	16,81	15,52	15,22	15,61
Sulawesi Barat	11,30	11,25	11,02	10,87	11,29
Indonesia	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

Jika dibandingkan tahun 2020, persentase penduduk miskin pada tahun 2021 seluruh provinsi di Pulau Sulawesi mengalami kenaikan. Fenomena ini juga terjadi pada persentase penduduk miskin secara nasional (naik 0,36 persen poin). Di lingkup Pulau Sulawesi, kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi dicapai oleh Sulawesi Tenggara (0,66 persen poin). Kenaikan persentase penduduk miskin terendah dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan, yang persentase penduduk miskinnya naik 0,06 persen poin.

Persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Sulawesi pada tahun 2021 terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 15,61 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 7,77 persen. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Barat berada pada urutan ketiga persentase penduduk miskin terendah di Pulau Sulawesi. Pada tahun 2021, hanya dua provinsi yang persentase penduduk miskinnya satu digit di depan koma, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

4.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi

Tingkat kedalaman kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi pada kurun waktu lima tahun (2017-2021) cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Jika kondisi tahun 2021 dibandingkan dengan kondisi tahun 2017, hanya Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengalami kenaikan tingkat kedalaman kemiskinan, sementara lima provinsi lainnya mengalami penurunan tingkat kedalaman kemiskinan. Provinsi yang mengalami penurunan terbesar tingkat kedalaman kemiskinan selama lima tahun terakhir yaitu Provinsi Gorontalo, sedangkan provinsi dengan penurunan tingkat kedalaman kemiskinan terkecil adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Jika dibandingkan tahun 2020, terdapat tiga provinsi mengalami peningkatan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021. Peningkatan tertinggi terjadi pada Provinsi Gorontalo yang meningkat sebesar 0,21 poin dan terendah terjadi pada Provinsi Sulawesi Utara yang meningkat sebesar 0,1 poin. Sementara itu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan. Provinsi dengan penurunan indeks kedalaman kemiskinan terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tengah (0,15 poin), sedangkan penurunan indeks kedalaman kemiskinan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan (0,04 poin).

Pada tahun 2021, Gorontalo memiliki tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi dengan nilai indeks sebesar 2,88, sedangkan Sulawesi Utara memiliki nilai indeks kedalaman kemiskinan terendah dengan nilai indeks sebesar 1,24. Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat kedalaman kemiskinan di bawah tingkat kedalaman kemiskinan nasional.

Tabel 11
Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi, 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	1,37	1,27	1,18	1,14	1,24
Sulawesi Tengah	2,55	2,64	2,33	2,58	2,43
Sulawesi Selatan	1,72	1,55	1,45	1,53	1,49
Sulawesi Tenggara	1,87	2,04	2,23	2,04	2,16
Gorontalo	3,68	3,06	2,64	2,67	2,88
Sulawesi Barat	1,88	1,76	1,75	1,89	1,76
Indonesia	1,83	1,71	1,55	1,61	1,71

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

4.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi di Pulau Sulawesi

Secara umum, tingkat keparahan kemiskinan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi cenderung berfluktuasi pada periode tahun 2017-2021. Jika dibandingkan tahun 2017, sebanyak lima provinsi mengalami penurunan indeks. Penurunan terbesar terjadi pada Provinsi Gorontalo yang turun sebesar 0,29 poin dan terendah di Sulawesi Barat yang turun sebesar 0,05 poin. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan sebesar 0,12 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Sulawesi Tenggara cenderung semakin timpang, sementara lima provinsi lain ketimpangannya semakin berkurang.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, tiga provinsi mengalami peningkatan indeks keparahan kemiskinan. Peningkatan indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo yang meningkat sebesar 0,07 poin dan peningkatan terendah di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meningkat sebesar 0,03 poin. Sementara itu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat mengalami penurunan indeks keparahan kemiskinan dengan penurunan terbesar terjadi di Sulawesi Tengah (0,13 poin).

Pada tahun 2021, Provinsi Gorontalo memiliki tingkat keparahan kemiskinan tertinggi dengan nilai indeks sebesar 0,72, sedangkan Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai indeks keparahan kemiskinan terendah sebesar 0,28. Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat keparahan kemiskinan di bawah tingkat keparahan kemiskinan nasional.

Tabel 12
Indeks Keparahahan Kemiskinan Menurut Provinsi
Di Pulau Sulawesi, 2017-2021

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sulawesi Utara	0,35	0,30	0,25	0,25	0,28
Sulawesi Tengah	0,72	0,74	0,63	0,77	0,64
Sulawesi Selatan	0,46	0,38	0,34	0,39	0,37
Sulawesi Tenggara	0,44	0,52	0,59	0,53	0,56
Gorontalo	1,01	0,75	0,63	0,65	0,72
Sulawesi Barat	0,49	0,44	0,42	0,49	0,44
Indonesia	0,48	0,44	0,37	0,38	0,42

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

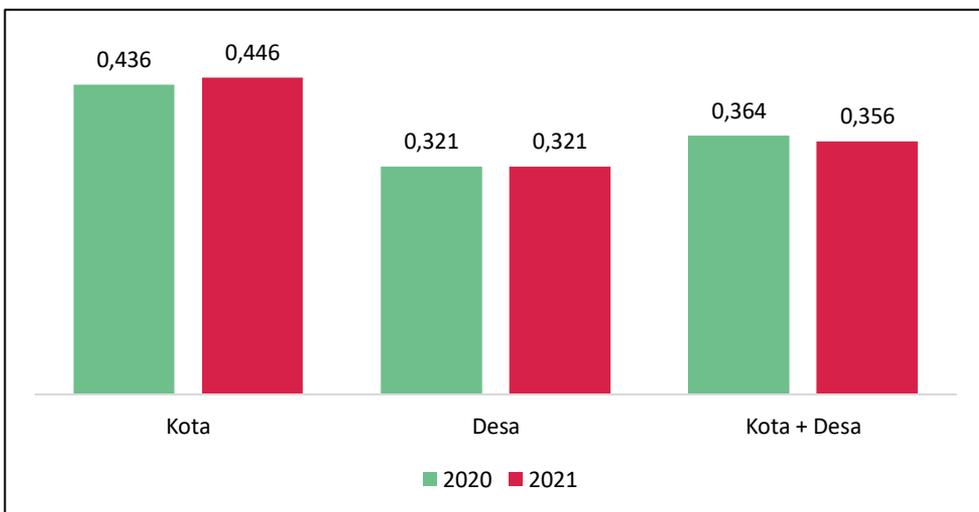
BAB V KETIMPANGAN PENGELUARAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

5.1. *Gini Ratio*

Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan *Gini Ratio* merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Pada periode 2020-2021, *Gini Ratio* Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan dari 0,364 menjadi 0,356. Jika dilihat menurut daerah, *Gini Ratio* di daerah perkotaan naik sebesar 0,010 poin, sedangkan di perdesaan tidak mengalami perubahan.

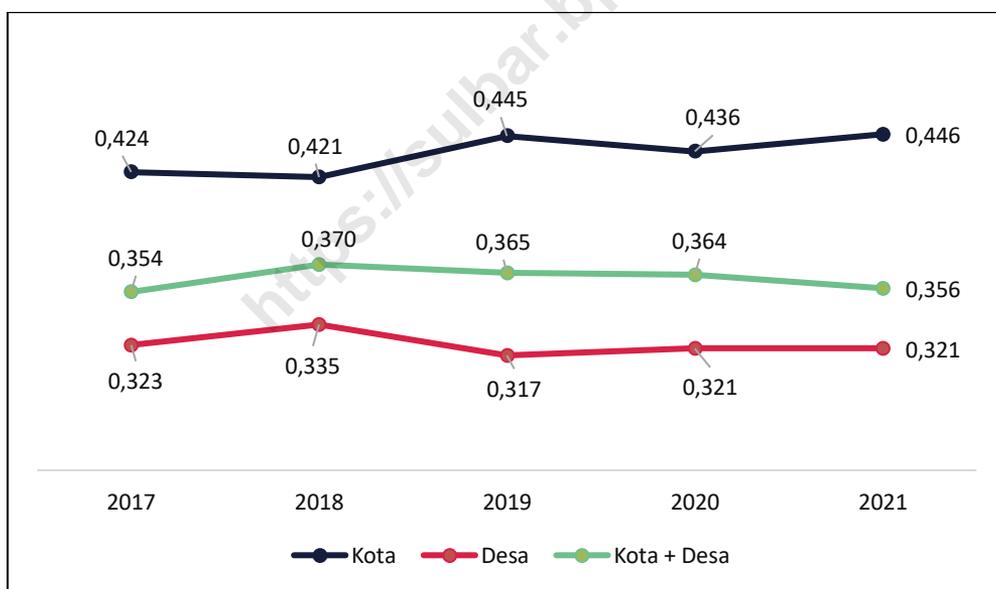
Gambar 5
***Gini Ratio* di Provinsi Sulawesi Barat Menurut Daerah, 2020-2021**



Sumber: Susenas Maret 2020-2021

Secara umum, perkembangan *Gini Ratio* pada periode 2017-2021 cenderung sedikit mengalami fluktuasi (Gambar 6). *Gini Ratio* sempat meningkat pada tahun 2018, turun kembali pada tahun 2019, dan kembali naik pada tahun 2020. Selama dua tahun terakhir, *Gini Ratio* cenderung stagnan. Jika dilihat menurut daerah, pada periode 2017-2021, *Gini Ratio* di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Tingginya ketimpangan pendapatan penduduk di daerah perkotaan tidak lepas dari tingginya keragaman jenis pekerjaan penduduk perkotaan dibanding perdesaan. Hal ini menyebabkan tingkat pendapatan penduduk di perkotaan semakin beragam. *Gini Ratio* di perkotaan mencapai titik tertinggi pada tahun 2021, sedangkan *Gini Ratio* di perdesaan berada di titik tertinggi pada tahun 2018.

Gambar 6
Gini Ratio di Perkotaan, Perdesaan, dan Kota + Desa, Sulawesi Barat, 2017-2021



Sumber: Susenas Maret 2017-2021

5.2. Kriteria Bank Dunia

Indikator lain untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

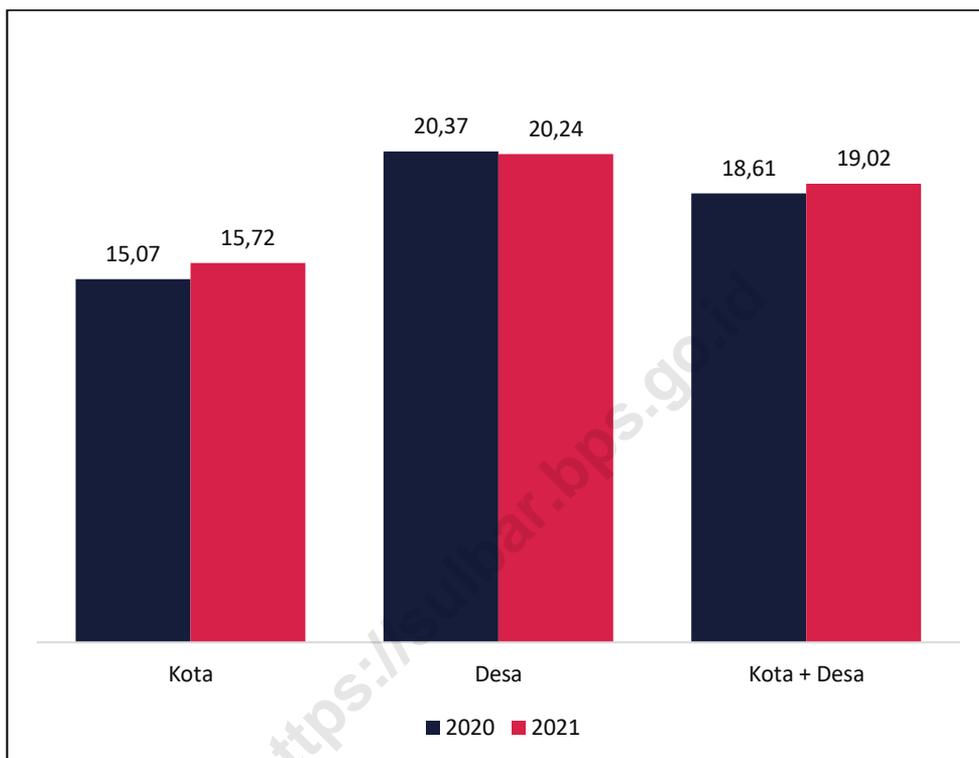
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

- a. Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen,
- b. Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada diantara 12 persen sampai dengan 17 persen,
- c. Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah di atas 17 persen.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Barat menurut kriteria Bank Dunia cenderung rendah (*low inequality*). Akan tetapi, pola berbeda terjadi bila dilihat menurut daerah. Ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Barat di perdesaan cenderung rendah, sedangkan ketimpangan pengeluaran di perkotaan cenderung sedang (Gambar 7).

Jika dilihat perkembangan pada tahun 2020-2021, persentase pengeluaran penduduk 40 persen terendah di daerah perkotaan pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan tahun 2020, namun tetap berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara itu, persentase pengeluaran penduduk 40 persen terendah di daerah perdesaan pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan tahun 2020 dan tetap pada kategori ketimpangan rendah.

Gambar 7
Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Sulawesi Barat
Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2020-2021



Sumber: Susenas Maret 2019-2021

Selama lima tahun terakhir, persentase pengeluaran penduduk 40 persen terendah di Sulawesi Barat cenderung semakin fluktuatif, namun masih berada pada kategori ketimpangan pengeluaran rendah. Jika dilihat menurut daerah, ketimpangan pengeluaran di perkotaan pada periode 2017-2021 termasuk dalam kategori sedang. Sementara itu, ketimpangan di daerah perdesaan pada periode 2017-2021 dikategorikan pada ketimpangan rendah. Jika dibandingkan menurut daerah, perkotaan memiliki ketimpangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan (Tabel 13). Alternatif mata pencaharian di daerah perdesaan lebih sedikit dibandingkan perkotaan, yang berdampak pada ketimpangan pengeluaran masyarakat desa yang rendah.

Tabel 13
Distribusi Pengeluaran Penduduk Sulawesi Barat
Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia,
2017-2021

Daerah/Kelompok Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (%)					
- 40% Terendah	16,48	15,53	14,65	15,07	15,72
- 40% Menengah	34,08	35,62	34,82	34,75	31,55
- 20% Teratas	49,44	48,84	50,53	50,18	52,73
Perdesaan (%)					
- 40% Terendah	20,56	20,00	20,59	20,37	20,24
- 40% Menengah	38,71	38,23	39,57	39,51	39,86
- 20% Teratas	40,72	41,77	39,84	40,12	39,90
Perkotaan + Perdesaan (%)					
- 40% Terendah	19,41	18,58	18,66	18,61	19,02
- 40% Menengah	37,09	36,36	37,26	37,30	37,68
- 20% Teratas	43,50	45,06	44,07	44,08	43,31

Sumber: Susenas Maret 2017-2021

BAB VI

PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN

PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021

6.1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi yang disajikan di dalam bab ini meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase wanita sebagai kepala rumah tangga dan rata-rata umur kepala rumah tangga. Ketiga karakteristik sosial demografi tersebut dibandingkan dengan melihat rumah tangga yang dikategorikan sebagai miskin dan tidak miskin.

Rumah tangga miskin cenderung memiliki jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak karena rumah tangga miskin diduga cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi. Dari tabel 14 terlihat bahwa di daerah perkotaan maupun perdesaan, pada tahun 2021 rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Jumlah anggota rumah tangga akan memengaruhi pola konsumsi dalam suatu rumah tangga. Selain itu, semakin banyak jumlah anggota rumah tangga maka tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi pengeluaran konsumsi semakin tinggi. Banyaknya jumlah anggota rumah tangga di tengah terbatasnya tingkat pendapatan cenderung menyebabkan rumah tangga lebih rentan masuk ke jurang kemiskinan.

Berkaitan dengan masalah kesetaraan gender, peran wanita sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga bukanlah hal yang mudah. Di Provinsi Sulawesi Barat, sebesar 13,97 persen kepala rumah tangga miskin adalah wanita, lebih besar jika dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang hanya sebesar 12,75 persen. Hal ini mengindikasikan kecenderungan wanita pada rumah tangga miskin untuk berperan ganda dalam rumah tangga sebagai pencari nafkah dan ibu yang harus melahirkan, merawat dan membesarkan anak-anaknya lebih besar dibandingkan pada rumah tangga tidak miskin. Kondisi ini merupakan cerminan secara umum di Provinsi Sulawesi Barat baik di perkotaan maupun di daerah perdesaan.

Tabel 14
Karakteristik Sosial Demografi
Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah (1)	Miskin (2)	Tidak Miskin (3)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga:		
- Perkotaan (K)	6,02	3,97
- Perdesaan (D)	5,01	3,85
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	5,52	3,91
2. Persentase wanita sebagai kepala rumah tangga:		
- Perkotaan (K)	12,95	11,69
- Perdesaan (D)	14,15	13,02
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	13,97	12,75
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga:		
- Perkotaan (K)	46,15	48,24
- Perdesaan (D)	46,18	47,18
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	46,17	47,71

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Rata-rata umur kepala rumah tangga digunakan untuk melihat produktivitas kerja dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Rata-rata umur kepala rumah tangga pada rumah tangga tidak miskin pada tahun 2021 lebih tinggi dari rumah tangga miskin, yaitu sebesar 47,71 tahun, sementara pada rumah tangga miskin 46,17 tahun. Jika dilihat dari daerahnya, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola yang sama. Umur kepala rumah tangga pada rumah tangga tidak miskin lebih tinggi daripada umur kepala rumah tangga pada rumah tangga miskin.

Tabel 15
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)
1. Rumah Tangga Miskin:		
- Perkotaan (K)	87,05	12,95
- Perdesaan (D)	85,85	14,15
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	86,03	13,97
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:		
- Perkotaan (K)	88,31	11,69
- Perdesaan (D)	86,98	13,02
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	87,25	12,75

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

6.2. Karakteristik Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan seseorang akan berkorelasi dengan taraf kehidupannya. Seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga pendapatan yang diperoleh akan lebih baik. Sebaliknya, seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah berpeluang memiliki pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Persentase kepala rumah tangga miskin yang buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya) lebih banyak bila dibandingkan kepala rumah tangga tidak miskin. Hal ini berlaku untuk wilayah perkotaan maupun perdesaan. Secara umum, persentase kepala rumah tangga miskin yang buta huruf sebesar 12,57 persen sedangkan kepala rumah tangga tidak miskin yang buta huruf sebesar 8,94 persen.

Tabel 16
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Kemampuan Membaca dan Menulis Kepala Rumah Tangga di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Dapat Membaca dan Menulis	Tidak Dapat Membaca dan Menulis
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin:		
- Perkotaan (K)	81,86	18,14
- Perdesaan (D)	88,39	11,61
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	87,43	12,57
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:		
- Perkotaan (K)	94,50	5,50
- Perdesaan (D)	90,19	9,81
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	91,06	8,94

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Tabel 17 menunjukkan bahwa persentase kepala rumah tangga (KRT) yang tidak tamat SD, tamat SD, dan taman SLTP untuk rumah tangga miskin lebih tinggi bila dibanding rumah tangga tidak miskin. Sementara itu untuk pendidikan yang lebih tinggi yaitu SLTA dan Perguruan Tinggi, persentase kepala rumah tangga miskin dengan tingkat pendidikan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa KRT yang tergolong miskin cenderung berpendidikan rendah.

Tabel 17
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Pendidikan Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Rumah Tangga Miskin:					
- Perkotaan (K)	21,78	48,17	10,31	19,61	0,13
- Perdesaan (D)	28,90	41,24	12,03	13,74	4,09
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	27,82	42,29	11,77	14,63	3,49
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:					
- Perkotaan (K)	15,91	26,06	9,33	28,85	19,86
- Perdesaan (D)	22,98	36,47	10,23	22,55	7,78
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	21,51	34,30	10,04	23,86	10,29

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

6.3. Karakteristik Ketenagakerjaan

Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga bersumber dari penghasilan utama rumah tangga yang diperoleh dari aktifitas bekerja atau sumber lainnya. Pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan spesifikasi yang tinggi umumnya akan memberikan penghasilan yang tinggi pula. Oleh karena itu, karakteristik ketenagakerjaan suatu rumah tangga dapat menggambarkan perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin, di antaranya lapangan usaha yang menjadi sumber penghasilan utama rumah tangga. Stigma rumah tangga miskin seringkali identik dengan bekerja di sektor pertanian, seperti petani gurem, nelayan, buruh tani dan perkebunan.

Tabel 18
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penghasilan Utama Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	Pertanian	Industri	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin:				
- Perkotaan (K)	9,40	37,76	14,32	38,52
- Perdesaan (D)	9,24	75,67	4,02	11,08
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	9,26	70,09	5,53	15,12
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:				
- Perkotaan (K)	12,08	31,93	7,98	48,02
- Perdesaan (D)	7,90	60,56	4,33	27,22
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	8,74	54,76	5,07	31,43

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Sumber penghasilan utama rumah tangga di Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar berasal dari sektor pertanian, mengingat Provinsi Sulawesi Barat memiliki komoditi unggulan yaitu kakao, kelapa sawit, kelapa, dan kopi. Meskipun secara umum sebagian besar rumah tangga tidak miskin memiliki sumber penghasilan utama rumah tangga di sektor pertanian, namun persentasenya lebih rendah dibanding rumah tangga miskin di sektor pertanian.

Persentase rumah tangga miskin yang tidak bekerja sedikit lebih besar dibanding persentase kepala rumah tangga tidak miskin yang tidak bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika kepala rumah tangga miskin tidak bekerja, rumah tangga tersebut kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda halnya dengan rumah tangga tidak miskin, yang masih dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun tidak bekerja. Sumber pembiayaan untuk kebutuhan rumah tangga yang tidak bekerja umumnya dapat berasal dari transfer atau sumber lainnya.

Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan persentase rumah tangga tidak miskin yang bekerja pada sektor yang sama. Sementara itu, persentase rumah tangga miskin dan persentase rumah tangga tidak miskin yang bekerja pada sektor industri hampir sama. Di sektor lainnya (jasa, perdagangan, transportasi, dll), persentase rumah tangga tidak miskin yang bekerja pada sektor ini lebih tinggi dibanding persentase rumah tangga tidak miskin.

Tabel 19
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Kegiatan Formal/Informal Kepala Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tidak Bekerja	Formal	Informal
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin:			
- Perkotaan (K)	9,40	23,05	67,55
- Perdesaan (D)	9,24	8,29	82,47
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	9,26	10,46	80,28
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:			
- Perkotaan (K)	12,08	38,68	49,24
- Perdesaan (D)	7,90	21,89	70,22
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	8,74	25,29	65,97

Keterangan :

Kegiatan Formal:

- Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- Buruh/karyawan/pegawai

Kegiatan Informal:

- Berusaha sendiri
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
- Pekerja bebas
- Pekerja keluarga atau tidak dibayar

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga diantaranya status pekerjaan yang disandang kepala rumah tangga. Ada indikasi bahwa mereka yang bekerja pada sektor formal akan memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibandingkan yang bekerja pada sektor informal. Dari Tabel 19 terlihat bahwa pada rumah tangga di Sulawesi Barat, baik rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin, sebagian besar kepala rumah tangga bekerja pada sektor informal. Sebanyak 80,28 persen kepala rumah tangga miskin berkerja pada sektor informal, lebih banyak jika dibandingkan kepala rumah tangga tidak miskin yang sebesar 65,97 persen.

Persentase kepala rumah tangga miskin yang bekerja di sektor informal lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin pada sektor yang sama. Kepala rumah tangga miskin di daerah perdesaan yang bekerja pada sektor formal hanya sebesar 8,29 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga tidak miskin di perdesaan yang sebesar 21,89 persen.

6.4. Karakteristik Perumahan (Tempat Tinggal)

6.4.1. Luas Lantai

Indikator perumahan dapat menjadi salah satu determinan penting tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Menurut Departemen Kesehatan (2002), salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapita minimal $8 m^2$. Rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari $8 m^2$ mencerminkan tingkat kesejahteraan yang kurang.

Tabel 20 menunjukkan bahwa di daerah perkotaan, sebagian besar rumah tangga miskin memiliki luas lantai per kapita $8-15 m^2$. Persentase rumah tangga yang memiliki luas lantai per kapita $>15 m^2$ kurang dari 10 persen. Di wilayah perdesaan, masih terdapat 28,33 persen rumah tangga miskin yang memiliki luas lantai per kapita kurang dari $8 m^2$. Hal ini menggambarkan bahwa pada rumah tangga miskin masih banyak rumah yang belum memenuhi standar kesehatan. Sementara itu, mayoritas rumah tangga tidak miskin memiliki luas lantai per kapita $>15 m^2$.

Tabel 20
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Luas Lantai Per Kapita (m²) di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	< 8	8 -15	>15
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin:			
- Perkotaan (K)	48,08	42,60	9,31
- Perdesaan (D)	28,33	42,23	29,44
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	31,23	42,28	26,48
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:			
- Perkotaan (K)	7,65	33,57	58,79
- Perdesaan (D)	11,96	29,20	58,83
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	11,09	30,09	58,82

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

6.4.2. Jenis Lantai

Penggunaan lantai tanah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Di Provinsi Sulawesi Barat, pola distribusi rumah tangga menurut jenis lantai terluas relatif sama baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Sebagian besar rumah tangga tersebut menggunakan lantai terluas bukan tanah. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan jenis lantai terluas bukan tanah sebesar 92,78 persen sedangkan pada rumah tangga tidak miskin sebesar 98 persen. Pola tersebut pun tergambar pada rumah tangga di daerah perkotaan maupun perdesaan. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan lantai tanah sudah relatif sedikit. Meskipun demikian, pada rumah tangga miskin di daerah perdesaan masih ada sekitar 8,46 persen rumah tangga yang menggunakan lantai tanah.

Tabel 21
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Lantai Terluas
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Bukan Tanah	Tanah
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin:		
- Perkotaan (K)	100,00	0,00
- Perdesaan (D)	91,54	8,46
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	92,78	7,22
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:		
- Perkotaan (K)	99,11	0,89
- Perdesaan (D)	97,72	2,28
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	98,00	2,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

6.4.3. Jenis Atap

Pemilihan jenis atap dengan kualitas tertentu menunjukkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Pemakaian jenis atap beton, genteng, dan lainnya oleh masyarakat Sulawesi Barat relatif sedikit. Hanya sebesar 1,9 persen rumah tangga miskin dan 2,16 persen rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jenis atap beton, genteng, dan lainnya. Masyarakat Sulawesi Barat lebih banyak menggunakan jenis atap seng/asbes. Hal ini terlihat pada Tabel 22 yang menunjukkan bahwa sebesar 89,37 persen rumah tangga miskin dan 94,04 persen rumah tangga tidak miskin yang menggunakan seng/asbes sebagai atap. Tingginya persentase penduduk yang tidak menggunakan jenis atap genteng tidak lain karena genteng relatif sulit didapatkan di wilayah Sulawesi Barat. Selain itu, pemilihan seng/asbes sebagai atap rumah dianggap lebih ekonomis.

Selain pemakaian jenis atap seng/asbes pada rumah tangga miskin, sirap/ijuk/rumbia juga merupakan jenis atap yang masih digunakan oleh rumah tangga miskin, yaitu sebesar 8,73 persen. Jika dilihat menurut daerah, persentase rumah tangga miskin di perdesaan yang menggunakan jenis atap sirap/ijuk/rumbia lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Penggunaan sirap/ijuk/rumbia yang masih cukup besar pada rumah tangga miskin dapat menjadi salah satu parameter penentuan rumah tangga miskin.

Tabel 22
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Daerah dan Jenis Atap Terluas di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Beton/ Genteng/ Lainnya	Seng/ Asbes	Sirap/ Ijuk/ Rumbia
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin:			
- Perkotaan (K)	0,00	92,33	7,67
- Perdesaan (D)	2,23	88,85	8,92
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	1,90	89,37	8,73
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:			
- Perkotaan (K)	3,67	92,58	3,76
- Perdesaan (D)	1,78	94,41	3,81
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	2,16	94,04	3,80

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

6.4.4. Jenis Dinding

Berdasarkan jenis dinding terluas, sebagian besar rumah tangga tidak miskin menggunakan dinding tembok, sedangkan sebagian besar rumah tangga miskin menggunakan dinding kayu. Meskipun demikian, sebanyak 40,68 persen rumah tangga tidak miskin juga menggunakan kayu sebagai dinding rumahnya. Hal ini terkait dengan sosio-kultural masyarakat di wilayah Sulawesi Barat yang masih cenderung menggunakan kayu sebagai jenis dinding terluas.

Tabel 23
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Jenis Dinding Terluas
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Tangga Miskin:				
- Perkotaan (K)	31,71	52,48	3,68	12,13
- Perdesaan (D)	25,70	64,71	4,42	5,17
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	26,58	62,91	4,31	6,19
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:				
- Perkotaan (K)	66,43	26,00	1,45	6,12
- Perdesaan (D)	50,59	44,41	1,20	3,80
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	53,80	40,68	1,25	4,27

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

6.4.5. Sumber Penerangan

Penggunaan listrik PLN lebih tinggi dibandingkan penggunaan listrik non PLN dan bukan listrik, baik di rumah tangga miskin maupun tidak miskin. Sebagian besar rumah tangga miskin telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, baik listrik PLN maupun non PLN. Rumah tangga miskin di daerah perkotaan yang menggunakan listrik PLN mencapai 100 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 71,73 persen. Namun, hal yang kurang menggembirakan adalah masih terdapat 2,39 persen rumah tangga miskin belum menikmati listrik. Hal yang sama juga terjadi pada rumah tangga tidak miskin. Sumber penerangan sebagian besar rumah tangga tidak miskin juga telah menggunakan listrik PLN. Jika dilihat menurut daerahnya, hampir seluruh rumah tangga tidak miskin di daerah perkotaan telah menggunakan listrik PLN. Dari tabel 24 terlihat bahwa di daerah perkotaan sebesar 0,29 persen rumah tangga tidak miskin yang tidak menggunakan listrik.

Tabel 24
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Penerangan Rumah
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Non Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin:			
- Perkotaan (K)	100,00	0,00	0,00
- Perdesaan (D)	71,73	25,46	2,81
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	75,89	21,72	2,39
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:			
- Perkotaan (K)	99,71	0,00	0,29
- Perdesaan (D)	91,62	7,55	0,83
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	93,26	6,02	0,72

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pemakaian non listrik pada rumah tangga miskin lebih besar bila dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian non listrik masih menjadi pilihan oleh rumah tangga miskin yang secara ekonomis lebih terjangkau.

6.4.6. Sumber Air Minum

Ketersediaan air bersih sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang menandakan kesehatan di suatu rumah. Ketidakterersediaan air bersih juga menjadi salah satu indikasi kemiskinan. Air bersih yang dimaksud adalah air yang bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat sejauh lebih dari 10 meter.

Tabel 25
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Sumber Air Minum Rumah Tangga
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga /Daerah	Air Bersih	Lainnya
(1)	(2)	(3)
1. Rumah Tangga Miskin:		
- Perkotaan (K)	83,81	16,19
- Perdesaan (D)	54,05	45,95
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	58,43	41,57
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:		
- Perkotaan (K)	89,64	10,36
- Perdesaan (D)	66,84	33,16
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	71,45	28,55

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Penggunaan air bersih pada rumah tangga tidak miskin sebesar 71,45 persen, lebih banyak bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang sebesar 58,43 persen. Baik di rumah tangga miskin maupun rumah tangga tidak miskin di daerah perkotaan, lebih dari 80 persen rumah tangga menggunakan air bersih. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana air bersih di daerah perkotaan, selain faktor ekonomi yang kemungkinan mempengaruhi hal tersebut.

6.4.7. Fasilitas Jamban

Fasilitas lain yang harus dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam mendukung pola hidup sehat adalah ketersediaan jamban. Selain ada tidaknya jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga penting yang dapat dibedakan atas jamban sendiri, bersama, dan umum/tidak ada.

Tabel 26
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Penggunaan Fasilitas Jamban
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah	Sendiri	Bersama	Umum/ Tidak ada
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rumah Tangga Miskin:			
- Perkotaan (K)	67,07	6,13	26,80
- Perdesaan (D)	57,75	6,39	35,86
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	59,12	6,35	34,53
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:			
- Perkotaan (K)	84,26	6,53	9,21
- Perdesaan (D)	78,61	6,20	15,19
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	79,75	6,26	13,98

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Persentase rumah tangga tidak miskin yang menggunakan jamban sendiri sebesar 79,75 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga miskin yang sebesar 59,12 persen. Sebanyak 34,53 persen rumah tangga miskin menggunakan fasilitas jamban umum atau tidak mempunyai jamban, lebih tinggi jika dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang hanya sekitar 13,98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak rumah tangga miskin belum memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan tidak menutup kemungkinan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebabnya.

6.4.8. Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal

Status pemilikan rumah dibedakan atas rumah sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa dan lain-lain). Berdasarkan status pemilikan rumah tempat tinggal, persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah sendiri sebesar 92,64 persen, lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin yang sebesar 89,44 persen. Pola berbeda terlihat pada status pemilikan rumah tempat tinggal kontrak/sewa dan lainnya dimana persentase rumah tangga tidak miskin lebih tinggi daripada rumah tangga miskin. Sementara itu, persentase rumah tangga miskin yang menempati rumah lainnya (rumah dinas, famili, bebas sewa dan lain-lain) lebih rendah dibandingkan persentase pada rumah tangga tidak miskin.

Jika dilihat wilayahnya, rumah tangga miskin di wilayah perdesaan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 7,02 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 9,32 persen. Status kepemilikan rumah belum begitu mengindikasikan status kemiskinan suatu rumah tangga. Rumah tangga miskin berusaha untuk memiliki rumah dengan fasilitas perumahan seadanya tanpa memperhatikan standar rumah sehat dan layak huni. Sementara itu, rumah tangga tidak miskin di daerah perkotaan yang menempati rumah kontrak/sewa sebesar 10,05 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 8,75 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan ekonomi rumah tangga tidak miskin untuk menyewa rumah dengan standar yang mereka inginkan.

Tabel 27
Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin
Menurut Daerah dan Status Pemilikan Rumah Tempat Tinggal
di Provinsi Sulawesi Barat, 2021

Karakteristik Rumah Tangga/ Daerah (1)	Sendiri (2)	Kontrak/ Sewa (3)	Lainnya (4)
1. Rumah Tangga Miskin:			
- Perkotaan (K)	90,68	0,00	9,32
- Perdesaan (D)	92,98	0,00	7,02
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	92,64	0,00	7,36
2. Rumah Tangga Tidak Miskin:			
- Perkotaan (K)	85,96	3,99	10,05
- Perdesaan (D)	90,32	0,93	8,75
- Perkotaan dan Perdesaan (K+D)	89,44	1,55	9,02

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jl. RE. Martadinata No. 10 Mamuju
Tlp.(0426) 22103 Fax. (0426) 21265
Email: sulbar@bps.go.id
Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>

ISSN 2655-0326



9 772655 032606